

PENGADILAN NEGERI BANTUL

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2018

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04

Bantul - DI Yogyakarta 55711

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348

e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348

Bantul - DI Yogyakarta 55711

e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Bantul adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Bantul. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bantul, 07 Januari 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

WIRATNO, SH.
NIP.197202131993031002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	20
V. Catatan atas Laporan Keuangan	22
A. Penjelasan Umum	22
A.1. Dasar Hukum.....	22
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bantul	23
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	24
A.4. Basis Akuntansi	24
A.5. Dasar Pengukuran	25
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	25
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	33
B.2. Belanja.....	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
C.1. Aset Lancar.....	38
C.2. Aset Tetap	39
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	43
C.6. Ekuitas.....	44
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	45
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	45
D.2. Beban Pegawai	45
D.3. Beban Persediaan	46
D.4. Beban Barang dan Jasa	47

D.5.	Beban Pemeliharaan	48
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	48
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	49
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	49
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	50
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	50
D.11.	Beban Lain-lain.....	51
D.12.	Kegiatan Non Operasional	51
D.13.	Pos Luar Biasa	52
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	53
E.1.	Ekuitas Awal	53
E.2.	Surplus (defisit) LO	53
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	53
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	53
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	54
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	54
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	54
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	54
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	55
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	55
E.3.	Ekuitas Akhir.....	56
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	57
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	57
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	57
	Laporan-laporan Pendukung.....	59
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	60
	Daftar Hibah Langsung.....	63

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2018 dan 2017	11
Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2018	33
Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2018 dan 2017	33
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2018	34
Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2018.....	34
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017	35
Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017	36
Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017	37
Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017	37
Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017.....	38
Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	38
Tabel 13 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2018 dan 31 Desember 2017	39
Tabel 14 Rincian Aset Tetap.....	40
Tabel 15 Rincian Saldo Tanah	40
Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	43
Tabel 17. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 2017	44
Tabel 18 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018	61
Tabel 19 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa	64
Tabel 20 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	65

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Bantul

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04 Bantul - DI Yogyakarta 55711

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348 e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, 07 Januari 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

WIRATNO, SH.
NIP.197202131993031002

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp7.765.508 atau mencapai 117,66 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp6.600.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp6.834.540.053 atau mencapai 99,32 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.881.346.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 2017 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018			TA 2017
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara	6.600.000	7.765.508	117,66	17.732.706
Belanja Negara	6.881.346.000	6.834.540.053	99,32	6.569.975.879

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2018 dan 2017 .

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp16.483.193.076, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp9.959.210; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp16.473.233.866; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp11.961.385 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp11.961.385 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp16.471.231.691, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp16.471.231.691.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2018	2017	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	9.959.210	4.532.560	5.426.650	119,72
Aset Tetap	16.473.233.866	16.879.425.508	(579.933.912)	(2,40)
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	16.483.193.076	16.883.958.068	(400.764.992)	(2,37)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	11.961.385	0	11.961.385	0,00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	11.961.385	0	11.961.385	0,00
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	0	0	0	0,00
Ekuitas Dana Investasi	16.471.231.691	16.883.958.068	(412.726.377)	(2,44)
Jumlah Ekuitas Dana	16.471.231.691	16.883.958.068	(412.726.377)	(2,44)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	16.483.193.076	16.883.958.068	(400.764.992)	(2,37)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 7.655.600, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 7.237.752.260 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 7.230.096.660) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 523.808 dan surplus(defisit) sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp 7.229.572.852)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018

adalah sebesar Rp 16.883.958.068 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp 7.229.572.852) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp 9.928.070) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 6.826.774.545 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp 16.471.231.691

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2018, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI BANTUL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 DAN 2017 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2018			TA 2017
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	6.600.000	7.765.508	117,66	17.732.706
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah			6.600.000	7.765.508	117,66	17.732.706
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	5.776.168.000	5.776.064.752	100,00	5.406.203.316
2.	Belanja Barang	B.2.2.	928.178.000	884.733.031	95,32	952.776.563
3.	Belanja Modal	B.2.3.	177.000.000	173.742.270	98,16	210.996.000
Jumlah Belanja Negara			6.881.346.000	6.834.540.053	99,32	6.569.975.879

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI BANTUL
NERACA
PER 31 Desember 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	9.959.210	4.532.560
Jumlah Aset Lancar		9.959.210	4.532.560
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	11.109.426.000	11.109.426.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.509.178.479	2.335.436.209
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	5.663.510.000	5.663.510.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	36.460.000	36.460.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	48.152.062	48.152.062
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(2.893.492.675)	(2.313.558.763)
Jumlah Aset Tetap		16.473.233.866	16.879.425.508
Jumlah Aset		16.483.193.076	16.883.958.068
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	11.961.385	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		11.961.385	0
Jumlah Kewajiban		11.961.385	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6	16.471.231.691	16.883.958.068
Jumlah Ekuitas Dana		16.471.231.691	16.883.958.068
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		16.483.193.076	16.883.958.068

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI BANTUL
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	7.655.600	17.635.840
Jumlah Pendapatan		7.655.600	17.635.840
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	5.776.064.752	5.406.203.316
Beban Persediaan	D. 3	55.731.950	72.508.845
Beban Barang dan Jasa	D. 4	465.547.961	424.874.034
Beban Pemeliharaan	D. 5	341.436.685	411.489.891
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	19.037.000	35.200.744
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	579.933.912	400.874.369
Jumlah Beban		7.237.752.260	6.751.151.199
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(7.230.096.660)	(6.733.515.359)
Kegiatan Non Operasional			
	D. 12		
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		523.808	188.696
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		523.808	188.696
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa			
Pos Luar Biasa			
	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(7.229.572.852)	(6.733.326.663)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI BANTUL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Ekuitas Awal	E. 1	16.883.958.068	5.980.866.417
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(7.229.572.852)	(6.733.326.663)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			11.084.175.141
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	11.093.775.735
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	(9.928.070)	(9.600.594)
Transaksi Antar Entitas		6.826.774.545	6.552.243.173
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 8	(412.726.377)	10.903.091.651
Ekuitas Akhir		16.471.231.691	16.883.958.068

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akruwal pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bantul

Visi Pengadilan Negeri Bantul adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul yang Agung, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Bantul adalah Misi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bantul.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul .
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Bantul melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara
dan Hibah
: Rp
7.765.508

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 7.765.508 atau mencapai 117,66 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 6.600.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.600.000	7.655.600	115,99
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	109.908	0,00
Total Pendapatan		6.600.000	7.765.508	117,66

- Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. (9.967.198) atau (128,35)persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan karena: Seluruh Persekot/Uang Muka Gaji untuk Hakim sudah diselesaikan pada Tahun Anggaran 2017 sehingga pada Tahun Anggaran 2018 sudah terdapat lagi persekot/uang muka gaji.
- Perbandingan realisasi PNBP TA 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	2017	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.655.600	7.361.600	294.000	3,84
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	10.274.240	(10.274.240)	(00,00)
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	109.908	96.866	13.042	11,87
Total Pendapatan		7.765.508	17.732.706	(9.967.198)	(128,35)

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp
6.834.54
0.053

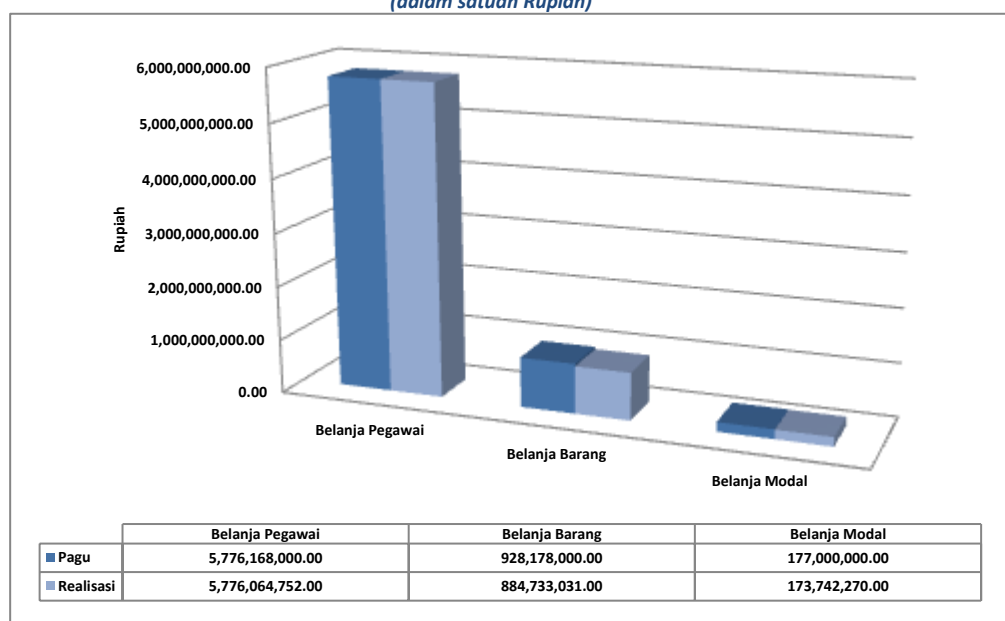
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember TA 2018 adalah sebesar Rp. 6.834.540.053 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,32% dari anggaran senilai Rp. 6.881.346.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2018		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5.776.168.000	5.776.066.423	100,00
Belanja Barang	928.178.000	884.733.031	95,32
Belanja Modal	177.000.000	173.742.270	98,16
Total Belanja Bruto	6.881.346.000	6.834.541.724	99,32
Pengembalian Belanja		(1.671)	0
Total Belanja Netto	6.881.346.000	6.834.540.053	99,32

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2018
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) 2018

- Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 264.564.174 atau sebesar 3,87 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena Kenaikan belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2018 dengan adanya mutasi pegawai maupun hakim yang berpengaruh pada besaran gaji ke 13 dan THR.

Perbandingan realisasi belanja TA 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	5.776.064.752	5.406.203.316	369.861.436	6,40
Belanja Barang	884.733.031	952.776.563	(68.043.532)	(7,69)
Belanja Modal	173.742.270	210.996.000	(37.253.730)	(21,44)
Total Belanja	6.834.540.053	6.569.975.879	264.564.174	3,87

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai
: Rp
5.776.064
.752*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 5.776.064.752 dan Rp. 5.406.203.316.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,40 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain:

Kenaikan tersebut disebabkan karena Kenaikan belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2018 dengan adanya mutasi pegawai maupun hakim yang berpengaruh pada besaran gaji ke 13 dan THR.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.564.951.200	2.563.955.000	996.200	0,04
Beban Pembulatan Gaji PNS	35.606	34.098	1.508	4,24
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	175.507.870	162.927.420	12.580.450	7,17
Beban Tunj. Anak PNS	48.227.032	41.901.572	6.325.460	13,12
Beban Tunj. Struktural PNS	36.400.000	16.770.000	19.630.000	53,93
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.115.210.000	1.836.955.000	278.255.000	13,15
Beban Tunj. PPh PNS	223.219.835	183.459.696	39.760.139	17,81
Beban Tunj. Beras PNS	127.748.880	126.952.260	796.620	0,62
Beban Uang Makan PNS	452.631.000	436.219.000	16.412.000	3,63
Beban Tunjangan Umum PNS	32.135.000	37.770.000	(5.635.000)	(17,54)
Total Belanja Brutto	5.776.066.423	5.406.944.046	369.122.377	6,39
Pengembalian Belanja	(1.671)	(740.730)	(123)	41,98
Total Belanja Netto	5.776.064.752	5.406.203.316	415.322.414	14,57

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang :
Rp884.7
33.031*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 884.733.031 dan Rp. 952.776.563.

Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami penurunan sebesar (7,56) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain:

Penyerapan anggaran yang baik untuk pemeliharaan dan operasional kantor.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	409.803.613	388.506.930	21.296.683	5,20
Belanja Barang Non Operasional	4.799.320	8.483.000	(3.683.680)	(76,75)
Belanja Jasa	117.587.513	115.202.748	2.384.765	2,03
Belanja Pemeliharaan	333.505.585	405.383.141	(71.877.556)	(21,55)
Belanja Perjalanan Dinas	19.037.000	35.200.744	(16.163.744)	(84,91)
Total Belanja Brutto	884.733.031	952.776.563	(68.043.532)	(7,69)
Pengembalian Belanja	0	(1.140.730)	0	0
Total Belanja Netto	884.733.031	951.635.833	(66.902.802)	(7,56)

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal
:Rp173.7
42.270

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 173.742.270 dan Rp. 210.996.000.

- Realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami penurunan sebesar (21,44) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain karena Anggaran Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2018 lebih kecil dibandingkan Tahun Anggaran yang lalu namun semua dapat diserap dengan baik.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	173.742.270	210.996.000	(37.253.730)	(21,44)
Total Belanja Brutto	173.742.270	210.996.000	(37.253.730)	(21,44)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	173.742.270	210.996.000	(37.253.730)	(21,44)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
9.959.210

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.959.210 dan Rp. 4.532.560.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2018 dan 2017 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	9.959.210	4.532.560
Total Aset Lancar	9.959.210	4.532.560

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2018	31 Desember TA 2017
1	Giro	0	
2	Tunai	0	
	Jumlah	0	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp9.959.210*

Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.959.210 dan Rp. 4.532.560. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Barang Konsumsi	9.738.210	4.450.560
2	Amunisi	221.000	82.000
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		9.959.210	4.532.560

Seluruh persediaan telah dilakukan opname fisik persediaan nomor :W13.U5/73/PL.07/I/2019.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
16.473.233.866*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersaji sebesar Rp. 16.473.233.866 dan Rp. 16.879.425.508. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan

operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 14 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan
1	Tanah	11.109.426.000	11.109.426.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2.509.178.479	2.335.436.209	173.742.270
3	Gedung dan Bangunan	5.663.510.000	5.663.510.000	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	36.460.000	36.460.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	48.152.062	48.152.062	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	19.366.726.541	19.192.984.271	173.742.270
	Akumulasi Penyusutan	(2.893.492.675)	(2.313.558.763)	(579.933.912)
	Nilai Buku Aset Tetap	16.473.233.866	16.879.425.508	(406.191.642)

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp11.109.426.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 11.109.426.000 dan Rp. 11.109.426.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	295	SHP No.18/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	864.357.000
2	2	305	SHP No.17/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	440.115.000
3	3	324	SHP No.16/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	467.532.000
4	4	358	SHP No.36/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	516.594.000
5	5	391	SHP No.19/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	318.903.000
6	6	399	SHP No.20/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	575.757.000
7	7	434	SHP No.37/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	626.262.000
8	8	630	SHP No.06/ Ringinharjo	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.357.020.000
9	1	2.759	SHP No.07/ Ringinharjo	Pemerintah RI c.q MARI	Kantor	5.942.886.000
Jumlah						11.109.426.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
2.335.436.209*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.335.436.209 dan Rp. 2.335.436.209.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2017	2.335.436.209
Mutasi Tambah	
Laptop,PC,TV,Meja Kursi Hakim,Kursi PTSP,AC,Kamera	173.742.270
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2018	2.509.178.479
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	2.182.640.784
Nilai Buku 31 Desember 2018	326.537.695

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
5.663.510.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.663.510.000 dan Rp. 5.663.510.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	5.663.510.000
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2018	5.663.510.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	683.506.891
Nilai Buku 31 Desember 2018	4.980.003.109

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp
36.460.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 36.460.000 dan Rp. 36.460.000.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2017	36.460.000
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2018	36.460.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	27.345.000
Nilai Buku 31 Desember 2018	9.115.000

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
48.152.062*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 48.152.062 dan Rp. 48.152.062.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2017	48.152.062
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2018	48.152.062
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	0
Nilai Buku 31 Desember 2018	48.152.062

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : (Rp
2.893.492.675)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing (Rp 2.893.492.675) dan (Rp 2.313.558.763).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2018 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.509.178.479	2.182.640.784	326.537.695
2	Gedung dan Bangunan	5.663.510.000	683.506.891	4.980.003.109
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	36.460.000	27.345.000	9.115.000
4	Aset Tetap Lainnya	48.152.062	0	48.152.062
	Jumlah	8.257.300.541	2.893.492.675	5.363.807.866

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp11.961.385*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 11.961.385 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2018 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 17. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Utang kepada Pihak Ketiga	11.961.385	0
Jumlah	11.961.385	0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp 0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Cadangan
Piutang:
Rp
16.471.231.691

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 16.471.231.691 dan Rp 16.883.958.068. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp : Rp
7.655.600*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 7.655.600 dan Rp 17.635.840. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 31 Desember TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.600.000	7.655.600	115,99
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
Total Pendapatan		6.600.000	7.655.600	115,99

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
: Rp
5.776.064.752*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp5.776.064.752 dan Rp5.406.203.316. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.564.951.200	2.563.955.000	996.200	0,03
Beban Pembulatan Gaji PNS	33.935	33.368	567	1,69
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	88.542.380	71.852.330	12.580.450	7,72
Beban Tunj. Anak PNS	175.507.870	162.927.420	6.325.460	15,09
Beban Tunj. Struktural PNS	36.400.000	16.770.000	19.630.000	117,05
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.115.210.000	1.836.955.000	278.255.000	15,14
Beban Tunj. PPh PNS	223.219.835	183.459.696	39.760.139	21,67
Beban Tunj. Beras PNS	127.748.880	126.952.260	796.620	0,62
Beban Uang Makan PNS	452.631.000	436.219.000	16.412.000	3,76
Beban Tunjangan Umum PNS	32.135.000	37.030.000	(4.895.000)	(13,21)
Total Beban Pegawai	5.776.064.752	5.406.203.316	369.861.436	6,40

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp
55.731.950*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 55.731.950 dan Rp 72.508.845. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	55.731.950	72.508.845	(16.776.895)	(23,13)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	55.731.950	72.508.845	(16.776.895)	(23,13)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp
465.547.961*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 465.547.961 dan Rp 424.874.034. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	239.535.173	185.912.360	53.622.813	28,84
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	11.542.500	20.311.150	(8.768.650)	(43,17)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	48.600.000	48.600.000	0	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	41.496.890	61.003.870	(19.506.980)	(31,97)
Beban Bahan	4.799.320	3.483.000	1.316.320	37,79
Beban Langganan Listrik	116.246.013	99.427.936	16.818.827	16,91
Beban Langganan Telepon	2.694.165	4.977.318	(2.283.153)	(45,87)
Beban Langganan Air	633.900	1.158.400	(524.500)	(45,27)
Total Beban Jasa	465.547.961	424.874.034	40.673.927	8,74

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp 341.436.685*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 341.436.685 dan Rp 411.489.891. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	168.836.213	216.252.250	(47.416.037)	(21,92)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	24.317.500	41.794.500	(17.477.000)	(41,81)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	140.351.872	147.336.391	(6.984.519)	(4,74)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	7.931.100	6.106.750	1.824.350	29,87
Total Beban Pemeliharaan	341.436.685	411.489.891	(70.053.206)	(20,52)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp
19.037.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 19.037.000 dan Rp 35.200.744. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	12.237.000	33.000.744	(20.763.744)	(62,91)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	4.800.000	2.200.000	2.600.000	118,18
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	2.000.000	0	2.000.000	0,00
Total Beban Perjalanan Dinas	19.037.000	35.200.744	(16.163.744)	(84,91)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp
579.933.912*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 579.933.912 dan Rp 400.874.369. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	106.032.651	110.621.739	(4.589.088)	(4,14)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	455.671.261	279.680.130	175.991.131	62,92
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.230.000	10.572.500	7.657.500	72,42
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	579.933.912	400.874.369	179.059.543	30,88

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset	0	0	0	0
Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan Non
Operasional :
Rp 523.808*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Penerimaan Kembali Belanja	109.848	96.866	12.982	11,82
Pegawai TAYL				
Pendapatan Penyesuaian Nilai	527.700	101.880	425.820	80,69
Persediaan				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	637.608	198.746	438.862	68,83

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNPB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 16.883.958.068 dan Rp 5.980.866.417

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar (Rp 7.229.572.852) dan (Rp 6.733.326.663) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 11.093.775.735.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar (Rp 9.928.070) dan (Rp 9.600.594) Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	(9.928.070)
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	(9.928.070)

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 6.826.774.545 dan Rp 6.552.243.173.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 31 Desember TA 2018**

(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(7.765.508)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.834.540.053
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	6.826.774.545

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar (Rp 7.765.508) sedangkan DKEL sebesar Rp 6.834.540.053.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, sebesar 0,- dari total 0,- yang diterima sepanjang tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran

E.3.Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 16.471.231.691 dan Rp 16.883.958.068.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak Terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK pada Tahun Anggaran ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Belanja yang Masih Harus Dibayar :

1. 521111 Belanja Keperluan Perkantoran (Internet) : Rp. 1.741.500
2. 522111 Belanja Langganan Listrik : Rp. 10.014.129
3. 522112 Belanja Langganan Telepon : Rp. 155.056
4. 522113 Belanja Langganan Air : Rp. 50.700

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Bantul adalah:

1. BRI Cabang Bantul A/C 0236-01-000627-30-2 a.n. BPG 030 PENGADILAN NEGERI BANTUL 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.0.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi Halaman III DIPA untuk Penyesuaian Penarikan Anggaran dan estimasi pendapatan.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB: pada Tahun Anggaran ini.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2018 di Pengadilan Negeri Bantul terdapat Pejabat Pengelola Keuangan Keputusan Pengguna Anggaran Mahkamah Agung RI Nomor: 42/PA/SK/XII/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bantul.

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang	: Wiratno, SH
Pejabat Pembuat Komitmen	: Satria Pinandita, SE
Bendahara	:Siswati Mariana Sihombing, A.Md

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Bantul

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2017	2018	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2018
A.	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Bantu	7	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	691.015.828	691.015.828	0	691.015.828	0
3	Alat Kantor	5	260.580.750	202.786.424	13.354.126	216.140.550	44.440.200
4	Alat Rumah Tangga	5	739.882.981	569.903.881	27.148.285	597.340.166	142.830.815
5	Alat Studio	5	27.430.000	11.510.000	3.980.000	15.490.000	11.940.000
6	Alat Komunikasi	5	7.890.000	7.890.000	0	7.890.000	0
7	Unit Alat Laboratorium	8	-	-	-	-	-
8	Komputer Unit	4	556.247.920	415.136.625	39.568.990	454.705.615	101.542.305
9	Peralatan Komputer	4	208.581.000	160.815.375	21.981.250	182.796.625	25.784.375
B.	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	4.713.053.000	194.680.429	389.360.858	584.041.287	4.129.011.713
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	794.315.000	31.296.368	62.592.737	93.889.105	700.425.895

3	Tugu/tanda Batas	50	156.142.000	1.858.833	3.717.666	5.576.499	150.565.501
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
1	Jalan	10	36.460.000	9.115.000	18.230.000	27.345.000	9.115.000
D.	Aset Tetap Lainnya						
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-					
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
1	Alat Angkutan Kendaraan Bermotor	5	850.000	850.000	0	850.000	0
2	Alat Kantor	5	38.872.000	38.872.000	0	38.872.000	0
3	Alat Rumah Tangga	5	17.366.000	17.366.000	0	17.366.000	0
4	Komputer Unit	4	1.833.000	1.833.000	0	1.833.000	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		8.268.069.479	2.372.479.763	579.933.912	2.952.413.675	5.315.655.804
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		8.268.069.479	2.372.479.763	579.933.912	2.952.413.675	5.315.655.804

Pengadilan Negeri Bantul

Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		U					
	Jumlah :						

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas Lapo
Kuan

005
01
0400
400172

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2018

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}